

LAPORAN

EVALUASI INTERNAL

**PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN,
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

TAHUN ANGGARAN 2023

TRIWULAN II



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan II Tahun 2023 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil evaluasi internal Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik di masa yang akan datang.

Benteng, 29 Juni 2023

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 1

 C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP 1

BAB II EVALUASI

 A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan 7

 B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran 10

 C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

 A. Permasalahan 15

 B. Rekomendasi 15

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Permen PAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023;
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan kedepannya.

C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

1. Peringkat : B

2. Alamat : Jalan Jend Ahmad Yani Mal Pelayanan Publik
(MPP)Benteng Kab.Kepulauan Selayar
3. Email : DPMPTSP.selayar@gmail.com
4. Titik koordinat : **S** 6,11924, **E** 120,467141
5. Foto kantor

Gambar 1.1



1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

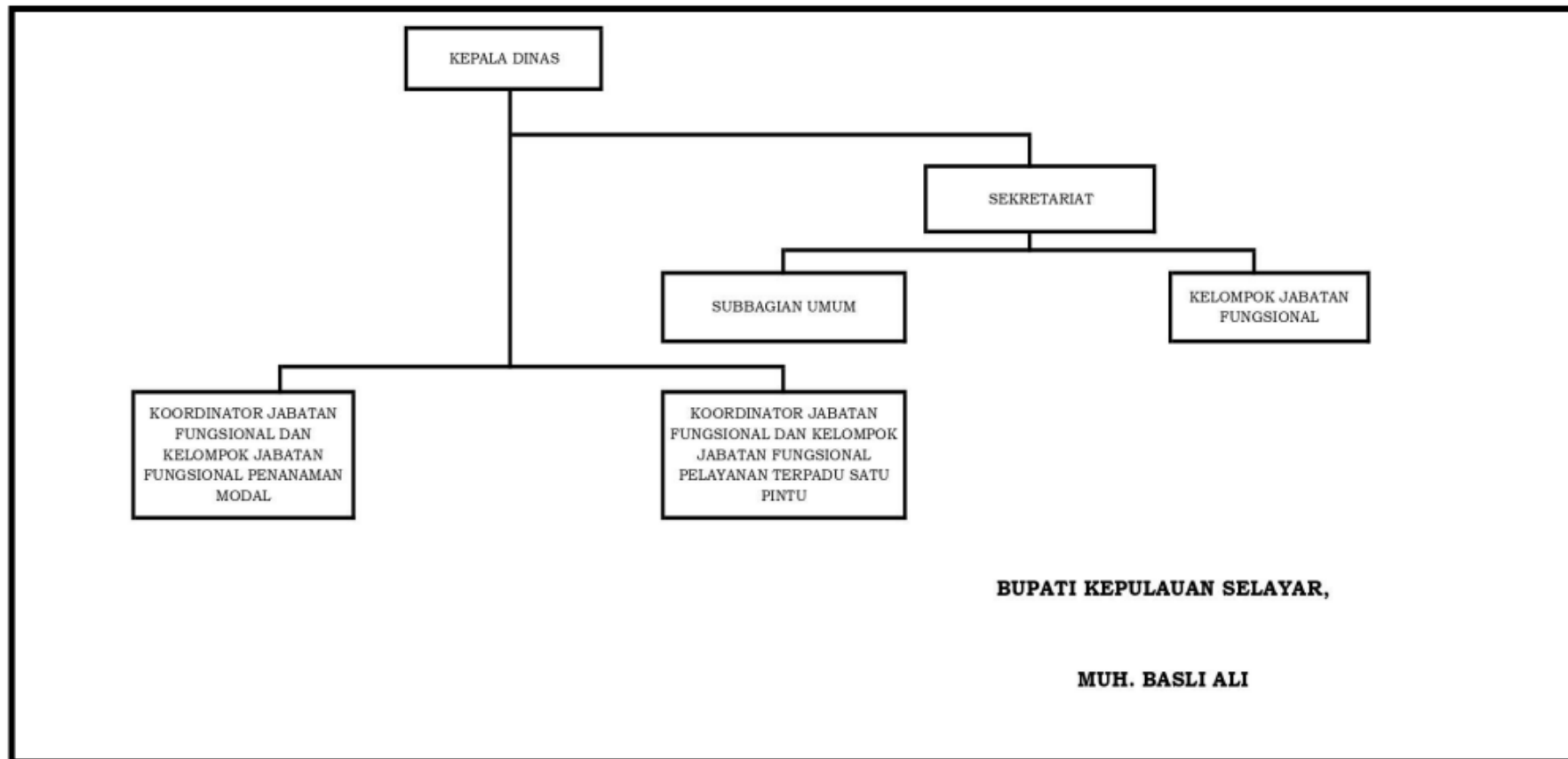
Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - Subbagian Umum
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
- Administrator (Kelas 12) = 1 orang
- Administrator (Kelas 11) = 3 orang
- Pengawas = 3 orang
- Pelaksana = 15 orang
- Fungsional = 6 orang
- Jumlah = 26 orang**

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1
 Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar
 Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per 31 Maret 2022

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	2	-	4	1	2	-	2	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	2	11	-	13	-	1	1	11	13	16	-
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	1	3	4	8	-	-	-	7	7	6	-
Jumlah		5	17	4	26	1	3	1	21	26	22	-

Sumber data : Subag. Umum Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Desember Tahun 2023

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II
EVALUASI

A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	70,28%	30,68 %	30,68 %
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	85,00%		
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10%	10%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1 dok	50 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-
	4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	-
	6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	-	-
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	-
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	100 %	32%	32%
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	26 orang/bulan	156 orang	600%
	2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	-	-

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dok	-	-
	4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 dok	3 laporan	25 %
	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	20,04%	20,04%
	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok	-	-
	2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dok	4 Dok	100 %
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dok	2 Dok	100%
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	35%	35%
	1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 Jenis	100 %
	2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Jenis	100 %
	3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	40 laporan	40 %
	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	71%	71%
	1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
	2) Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
	3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 unit	25%
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	30,70%	30,70%
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 Jenis layanan	100 %
	2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 laporan	3 Jenis layanan	100 %
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	-	-
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	1 Unit	50%
	2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 jenis	3 jenis	60%

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	-	-
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit		
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	240 Perusahaan	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	3 kali	2 kali	60,67%
	1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dok	-	-
		Kegiatan pameran penanaman modal		-	-
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	52.000	-	-
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	52.000	-	-
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 pelaku usaha	64 pelaku ussha	31,4%
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 pelaku usaha	25 pelaku usaha	41,67%
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	40%	-	-
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	1 dok	-	-
	1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	-	-	-
	2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia	-	-	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	128,74%	128,74%
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	1300 izin	128,74%	128,74%
	1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1300 izin (Pelaku Usaha)	0.29	0.29
	2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	13 Kegiatan Usaha)	-	-

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang Memperoleh LayananKonsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan	4 pelaku usaha	1 pelaku usaha	8,33%
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	25 %	25 %
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	25 %	25 %
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yangDiolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	3 dokumen	25 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian program dan kegiatan triwulan II tahun 2023 mencapai 32,62%. atau rata-rata **Sangat rendah** karena masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	5	6	7	8
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.527.036.022	1.705.102.971	
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000		
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	-	-
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5.000.000	4.391.000	87,82 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	-	-
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	3.000.000	2.289.000	76,30%
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	-	-
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	-	-
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100%

No.	Ururan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.805.752.022	1.317.159.876	34,61%
		1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.792.752.022	1.312.298.876	34,60%
		2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	2.150.000	53,75%
		3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	4.000.000	-	-
		4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	2.711.000	54,22%
		c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12.000.000	2.107.000	52,68%
		1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.000.000	2.107.000	52,68%
		2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4.000.000	-	-
		3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4.000.000	-	-
		d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.666.400	121.403.190	92,21%
		1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.002.400	5.370.000	53,69%
		2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.070.000	1.900.000	37,48%
		3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	116.594.000	114.133.190	97,89%
		e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.722.000	-	-
		1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
		2) Pengadaan mebel	-	-	-
		3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10.722.000	-	-
		f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.497.600	179.521.966	37,60%
		1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	196.990.000	45.733.566	49,75%
		2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	280.507.600	133.788.400	47,70%
		g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.120.000	21.960.000	29,23%
		1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000	15.559.000	51,86%
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35.240.000	3.410.000,	9,68%
		3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-
		4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.880.000	2.991.000,00	30,27%
2.	Ururan Penanaman Modal	2. Program Promosi Penanaman Modal	340.000.000	32.978.800	9,70 %
		Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	340.000.000	32.978.800	9,70%

No.	Ururan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	32.978.800	9,70%
		3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	469.500.000	10.088.400	2,15%
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	469.500.000	10.088.400	2,15%
		1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	348.090.000	7.928.400	2,28%
		2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.410.000	2.160.000	1,78%
		4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000	20.226.000	40,45%
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	50.000.000	20.226.000	40,45%
		1) penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	20.226.000	40,45%
		5. Program Pelayanan Penanaman Modal	80.000.000	16.570.000	20,7%
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	16.570.000	20,7%
		1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.000.000	14.830.000	46,34%
		2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13.530.000	390.000	2,88%
		3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	13.500.000	-	-
		4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.970.000	-	-
		6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8.000.000	1.350.000	16,88%
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	1.350.000	16,88%
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8.000.000	1.350.000	16,88%

Realisasi anggaran Triwulan II sebesar Rp. 1.784.966.171,- dari Jumlah anggaran Tahun 2023 senilai Rp. 5.466.536.022,- sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan II tahun 2023 sebesar 32,65%.

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II tahun 2023 Sesuai tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023	Realisasi	Persentase Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	65,00 (B)		
			Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	65 (B)		
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	72,50%		
2	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1,50 %		
			Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	6,00%		
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	10,00%		
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	4,00%		
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	84,00%		

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Serapan anggaran Dinas PMPTSP masih terbilang rendah tetapi terdapat peningkatan dari Triwulan I yaitu 22,45% ke 32,65% karena masih ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum terealisasi yang disebabkan oleh mekanisme penggunaan aplikasi perencanaan SIPD belum sepenuhnya dipahami oleh PPTK.
2. Refocussing anggaran Dinas PMPTSP tahun 2023 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan mengalami kendala.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah :

1. Perlunya peningkatan kompetensi PPTK terkait penerapan aplikasi SIPD sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak salah rekening yang menyebabkan kendala pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu adanya kepastian anggaran taktis bagi pemerintah daerah di awal tahun sehingga tidak terjadi refocusing anggaran pada pertengahan tahun.

BAB IV

P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan/subkegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

Benteng, 29 Juni 2023

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022